

TAJUK RENCANA

Harga Pangan Saat Ramadan

SEPERTI biasanya, memasuki bulan Ramadan harga sejumlah komoditi bahan pokok pangan mengalami fluktuasi. Namun sejauh ini masih dalam batas wajar dan terjangkau konsumen. Berkaitan itu tim monitoring di tingkat kabupaten/kota terus mengawasi agar harga kebutuhan pangan stabil, tidak ada penimbunan barang maupun monopoli serta persaingan tak sehat.

Kita mengapresiasi langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KP-PU) Kantor Wilayah (Kanwil) IV area Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Satgas Pangan Polda DIY untuk melakukan survei lapangan komoditi bahan pokok pangan menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN) di Pasar Beringharjo Sabtu lalu (KR 12/4).

Harapannya, hasil survei tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok pangan. Tak bisa dipungkiri, pemerintah adalah pemegang otoritas dalam pengendalian harga. Pemerintah sekaligus juga berfungsi sebagai regulator dalam mengendalikan harga. Meski demikian, langkah memberi edukasi kepada pedagang masih sangat diperlukan, terutama menyangkut cara jual mereka. Diakui, umumnya para pedagang di pasar tradisional memilih cara jual putus, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga.

KPPU sangat berharap pasar tradisional seperti Pasar Beringharjo menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga pokok pangan. Harapan ini tentu tidak berlebihan sepan-

jang para pedagang telah tereduksi dengan baik, terutama dalam hal cara jual mereka yang terus diperbaiki. Ke depan, stabilisasi harga tak hanya bergantung pada peran pemerintah tapi pada para pedagang itu sendiri. Dengan harga yang stabil, pemerintah tak perlu lagi melakukan operasi pasar (OP) atau tindakan lainnya.

Kini yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan ketersediaan komoditi bahan pokok pangan mencukupi, terlebih menjelang, saat dan sesudah Lebaran nanti. Sebab, hampir dipastikan, pada masa seperti itu kebutuhan masyarakat meningkat dan permintaan di pasar naik. Bila persediaan terbatas, hukum ekonomi berlaku, harga akan naik.

Dalam kondisi seperti ini dikhawatirkan muncul para spekulan yang hanya mengejar keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang lain. Belum lagi para penimbun barang yang mengacaukan situasi pasar. Untuk itulah diperlukan tindakan tegas dari Satgas Pangan. Mereka yang terbukti menimbun barang, seperti terungkap akhir-akhir ini di wilayah Jawa Tengah, harus dikenai sanksi tegas dan diproses hingga ke pengadilan. Sanksi tegas diperlukan untuk memberi efek jera kepada pelaku.

Lebih dari itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa distribusi komoditi bahan pokok pangan lancar tanpa hambatan. Sebab, bila pasokan tersendat bakal berimplikasi pada stabilitas harga. Harga menjadi tidak stabil hingga membuka ruang bagi spekulan untuk bermain. Distribusi dan tata niaga barang adalah hal penting yang tak boleh diabaikan, sehingga harus diatur dan diawasi pemerintah. □

BEBERAPA tahun terakhir muncul kekhawatiran terjadinya krisis air di DIY. Kekhawatiran terjadinya krisis air di DIY muncul disebabkan terjadinya kekurangan dan penurunan debit air tanah. Dinas PUP ESDM DIY pada 2020 mencatat setidaknya 130 wilayah di DIY menghadapi kekeringan saat musim penghujan. Masalah krisis air adalah akibat dari ketimpangan dalam penggunaan air tanah.

Ketimpangan air terjadi dalam hal alokasi dan redistribusi air tanah. Ketimpangan distribusi mengacu pada Shohibuddin (2019) adalah kesenjangan akibat perbedaan kemampuan berbagai kelas sosial dalam penggunaan air tanah. Ketimpangan alokasi adalah kesenjangan peruntukan air bagi rakyat kecil dan kelas atas.

Penyebab Ketimpangan

Beberapa faktor dapat diidentifikasi menjadi pemicu ketimpangan distribusi dan alokasi air tanah yang ada di DIY. Pertama, terjadinya periurbanisasi atau pemekaran wilayah perkotaan di Sleman sebagai daerah hulu menyebabkan beralihnya daerah resapan air banyak berubah menjadi permukiman dan peruntukan lain. Studi Sawitri (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di Sleman memiliki kondisi daerah resapan air yang kritis akibat konversi lahan.

Kedua, periurbanisasi di Sleman juga telah memicu tumbuhnya hotel dan mall berkontribusi pada peningkatan ketergantungan air tanah. Riset Amrta Institute (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan hotel membuat adanya kompetisi dengan warga dalam memanfaatkan sumur bor yang memakan biaya 400-500 juta. Warga tentu saja menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mampu membuat sumur bor sendiri.

Ketiga, PDAM sendiri masih bergantung pada penggunaan air tanah dan memiliki keterbatasan dalam memberikan akses kepada masyarakat. PDAM memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat pada dasarnya menggunakan

Anggalih Bayu MK

logika pasar, sehingga membebankan biaya kepada para pelanggannya. Studi Wardiha et.al. (2019) terhadap PDAM Sleman menunjukkan konsumsi air dari pelanggan terbilang rendah disebabkan besarnya biaya yang harus mereka tanggung. Masyarakat lebih memilih menggunakan air tanah dengan membuat sumur sendiri disebabkan lebih terjangkau.

Reforma Agraria

Reforma agraria dapat menjadi pijakan awal dalam perbaikan kontrol dan penggunaan air di DIY. Reforma agraria menjadi jalan untuk melakukan penataan ulang kondisi yang dipenuhi oleh kesenjangan, demi memastikan perbaikan akses air bagi kalangan rakyat kecil. Hal tersebut berperan penting untuk menanggulangi ketergantungan pada air tanah dan akses terbatas pada kelas atas. Apalagi berdasar pada paparan Tim BBWS Serayu Opak (2020) sebenarnya DIY memiliki potensi untuk memanfaatkan air baku dari Sungai Progo, Oyo dan Opak.

Langkah reforma agraria dapat dimu-



KR-JOKO SANTOSO

lai dengan penataan ulang atas daerah resapan air untuk mencegah air hujan semata menjadi limpasan. Hal tersebut penting untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai peruntukannya dan membatasi konversi lahan akibat dari adanya periurbanisasi. Penataan atas daerah resapan air berperan penting dalam memperbaiki kemampuan lahan dalam menyerap air hujan. Sekaligus secara bersamaan mengurangi konsentrasi penguasaan dan peruntukan lahan untuk hotel dan mall. Selanjutnya, penataan dilakukan dengan membuat batas maksimum atas air tanah untuk mencegah masifnya penggunaan sumur bor terutama oleh hotel dan mall.

Reforma agraria berperan pula dalam menjaga ketersediaan air baku yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan penataan atas Daerah Aliran Sungai semata untuk kepentingan kelestarian lingkungan. Sehingga air baku dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tindak lanjut perbaikan akses adalah dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan/-Komunitas (SPAMDes/K) dengan membangun jaringan dari sumber air baku yang telah ditetapkan. Prinsip penentuan harga konsumsi dari SPAMDes harus ditentukan bersama oleh sebuah komisi yang berisi wakil dari masyarakat, pengelola dan pemerintah. Sehingga upaya reforma agraria dalam mengatasi masalah kesenjangan selalu ditopang oleh kelembagaan masyarakat yang demokratis. □

**) Anggalih Bayu Muh Kamim, peneliti junior Polgov DPP Fisipol UGM*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pendekatan Lain Mitigasi Banjir dan Rob

BEBERAPA waktu lalu, Harian *Kedaulatan Rakyat* (25/3) menyatakan, kerawanan bencana banjir dan abrasi tinggi, khususnya di sekitar pantura dan Kota Semarang. Di sisi lain, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menyatakan, secara teknikal konsep penanganan banjir dapat dilaksanakan dengan tiga strategi : hulu, tengah dan hilir. Strategi teknikal telah dilakukan Kementerian PUPR, termasuk salah satunya tol Semarang-Demak, dimana terdapat tambahan fungsi kolam retensi dan tanggul. Selain itu ada rumah polder dan pompa yang telah dibangun.

Banjir dan rob adalah dua hal yang berbeda, tetapi dapat muncul bersamaan. Banjir disebabkan curah hujan. Sementara rob disebabkan gerakan air laut yang bergerak naik sampai jauh ke arah daratan. Selain itu Semarang bagian utara mengalami *land-subsidence* atau penurunan muka tanah. Laju penurunan muka tanah 9-10 cm/tahun. Rata-rata penduduk di sekitar Tanjung Mas meningkatkan rumahnya guna meminimalisir dampak *land subsidence*. *Land-subsidence* dapat diminimalisir di masa mendatang salah satunya dengan aturan pembatasan air tanah di sekeliling industri daerah Semarang Utara.

Secara garis besar sungai-sungai utama yang bermuara di pesisir Kota Semarang dikelompokkan menjadi tiga daerah aliran sungai (DAS) : Bringin, Garang, dan Mundu. Sementara DAS yang paling berperan menimbulkan banjir, selain dalam hal ukuran luasan maupun banyaknya aliran adalah DAS Garang dan DAS Mundu. Kedua DAS tersebut berhulu di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. DAS Garang merupakan hulu dari KBB dan Kali Semarang. Sedangkan DAS Mundu merupakan hulu dari Kali Banger, KBT, Kali Tenggang, Kali Sringin, dan Kali

Dimas H Nugraha

Babon. Tantangan lainnya adalah DAS Tenggang dan DAS Sringin, topografi permukaan relatif datar dengan kemiringan permukaan rata-rata kurang dari 3%, dimana elevasi permukaan tanah setempat hanya berkisar 0 - 26 meter di atas permukaan laut. (pu.go.id).

Penataan Ruang

Dengan kondisi ini tragisnya penataan ruang dimana di kawasan hulu yang ada di Kabupaten Semarang banyak beralih fungsi. Lahan yang dahulu hutan, sekarang menjadi tegalan, kawasan perumahan dan permukiman. Ini mempengaruhi laju infiltrasi tanah dan menghambat *water storage* sehingga *surface run-off* menjadi besar. Solusinya, perlu dioptimalkan kerja sama antardaerah antara Kota Semarang dan kabupaten sekitar. Misalnya dengan revitalisasi kawasan hijau, termasuk kepatuhan pelaksanaan RTRW kabupaten di sekeliling Kota Semarang. Ke depan Pemprov Jawa Tengah dapat menerapkan skema insentif-disinsentif untuk mengatur hal tersebut.

Untuk pengelolaan lingkungan dan normalisasi berbagai sungai di Semarang telah dilakukan. Hanya mungkin ke depan Pemkot Semarang perlu menambah dengan gerakan restorasi sungai. Selain itu, pengelolaan lingkungan dapat juga dengan menggunakan *eco-engineering* yang merupakan salah satu komponen teknologi *ecological-hydraulic* (eko-hidraulik). Pada prinsipnya konsep ini dapat digunakan juga untuk menanggulangi abrasi pantai, danau, sedimentasi di sungai dan lainnya.

Langkah *eko-hidraulik*, dengan

pemilihan vegetasi, yang diterapkan yaitu bertujuan mencegah erosi di bantaran sungai. Jenis vegetasi untuk perlindungan tebing yang tepat adalah dengan menggunakan tanaman lokal. Misalnya yang diusulkan Budinetro (2001) dalam Maryono (2008), seperti *Vetiveria zizanioides* (rumput vetiver atau rumput akar wangi), *Ipomoea carnea* (karangkungan), dan bambu

Pemerintah Kota Semarang dapat juga mereplikasi yang dilakukan DIY dan masyarakatnya dalam penanganan Kali Code, lewat peran masyarakat yang besar dengan adanya Kelompok Peduli Sungai. Serta kolaborasi dengan perguruan tinggi setempat melalui program pengabdian masyarakat/kuliah kerja nyata dari mahasiswa □

**) Dimas Hastama Nugraha ST Meng, Perekayasa Muda di BP2P Jawa III, Kementerian PUPR Bidang Humas Himpunan Peneliti Indonesia DIY 2019-2024*

Pojok KR

Laksanakan ibadah dengan tetap menegakkan prokes.
-- Menyelamatkan diri dan orang lain bagian dari ibadah.

Penerapan PTM dimonitor secara berkala.
-- Tak cukup dimonitor, tapi juga dievaluasi.

Menaker terbitkan SE kewajiban THR.
-- Karena bersifat wajib, pengusaha harus menaati.

Berab

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakil. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrkry23@yahoo.com, iklandkrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' ..Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.